



Pengukuran Daya Saing Wilayah Berbasis Indeks Pembangunan Daerah

Measuring Regional Competitiveness Through The Regional Development Index

Rismayanti Amir

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo
email: rismayanti@iainpalopo.ac.id

Disubmit: 1 Juni 2024; Direvisi; 4 Juli 2024; Dipublish; 1 Oktober 2024

Abstract

This research aims to conduct an analysis focusing on measuring the level of regional competitiveness by utilizing the regional development index as a measure of regional development performance in Luwu Raya. This measurement examines several indicators considered influential, namely economic, social, infrastructure, and environmental aspects. The sample in this research includes all regions in Luwu Raya, comprising Palopo City, Luwu Regency, North Luwu Regency, and East Luwu Regency. The method employed in this research is quantitative analysis using the composite performance index as the analytical technique. The primary steps in constructing a composite index involve weighting, literature studies, trend determination, alternative index determination, and composite index determination. The results reveal that the regional competitiveness in Luwu Raya is unevenly distributed. Palopo City is the region with the highest level of competitiveness, while two regencies, North Luwu and Luwu, have the lowest levels of competitiveness. The most influential aspect of regional competitiveness is infrastructure, as measured by data on the condition of paved roads and clean water distribution. The problem that needs to be addressed in almost all regions of Luwu Raya is poverty. Infrastructure is a pioneering indicator that can have a significant positive or negative impact on development in Luwu Raya. Therefore, it is expected that the government can focus its development policies on infrastructure to provide multiplier effects on economic and social aspects through inclusive economic growth and job creation.

Keywords : regional competitiveness; regional development index; measuring

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yang berfokus pada pengukuran tingkat daya saing wilayah dengan menggunakan indeks pembangunan daerah sebagai ukuran kinerja pembangunan daerah. Pengukuran ini meneliti beberapa indikator yang dianggap berpengaruh, yaitu aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah di Luwu Raya diantaranya Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan composite performance indeks sebagai teknik analisisnya. Langkah-langkah utama dalam menyusun indeks komposit meliputi pembobotan, studi literatur, penentuan tren, penentuan indeks alternatif, dan penentuan indeks komposit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing wilayah di Luwu Raya tidak merata. Kota Palopo merupakan wilayah dengan tingkat daya saing tertinggi, sedangkan 2 kabupaten, yaitu Luwu Utara dan Luwu, merupakan wilayah dengan tingkat daya saing terendah. Aspek yang paling berpengaruh terhadap daya saing wilayah tersebut adalah aspek infrastruktur, yang diukur melalui data kondisi jalan mantap dan distribusi air bersih. Masalah yang harus diatasi di hampir seluruh wilayah Luwu Raya adalah masalah kemiskinan. Aspek infrastruktur merupakan indikator yang menjadi pionir dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif yang besar terhadap pembangunan di Luwu Raya. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat memfokuskan kebijakan pembangunannya pada aspek infrastruktur, sehingga dapat memberikan efek berganda pada aspek ekonomi dan sosial melalui pertumbuhan ekonomi inklusif dan lapangan kerja.

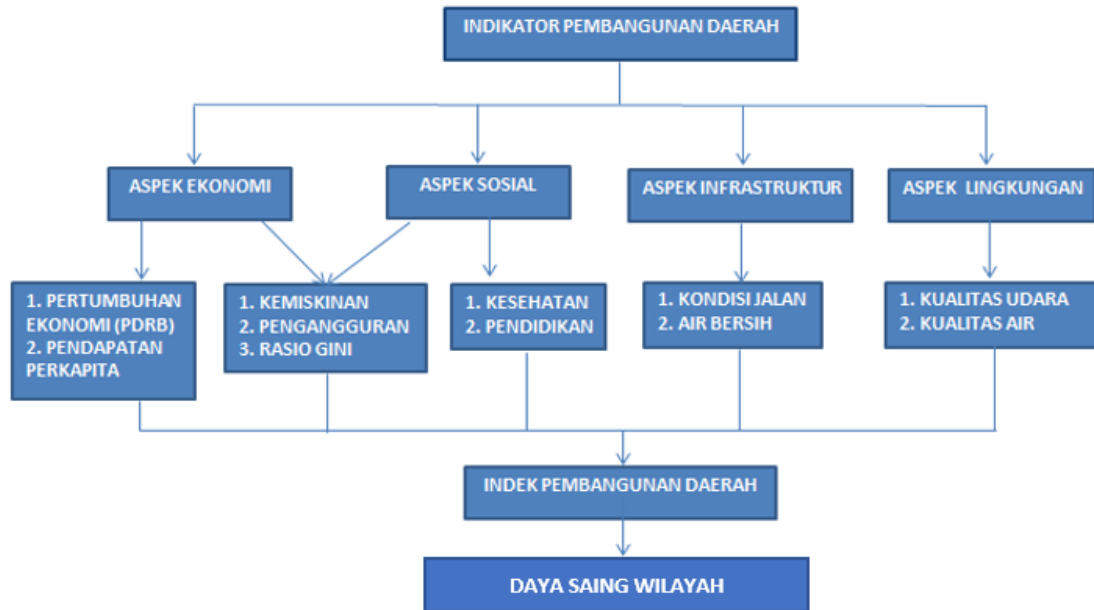
Kata kunci: Daya Saing Wilayah; Indeks Pembangunan Daerah; Pengukuran

1. PENDAHULUAN

Daya saing antar wilayah menjadi suatu barometer bagi pembangunan daerah yang diukur bukan hanya berdasarkan tingkat produksi semata, tapi juga dari berbagai elemen dan peran. Pengukuran daya saing dengan menggunakan PDRB atau pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan acuan utama dalam penentuan progres pembangunan suatu wilayah melalui daya saingnya karena pertumbuhan ekonomi cenderung tidak memperhatikan inklusivitas terhadap aspek-aspek terkait secara menyeluruh. Pembangunan menyentuh berbagai aspek yang bersifat inklusif dalam tatanan hidup masyarakat diantaranya ekonomi, sosial, infrastruktur maupun kondisi lingkungan. Hal ini menghasilkan pengukuran daya saing wilayah yang lebih komprehensif. Identifikasi daya saing regional sebagai konsep ganda menurut (Huggins et al., 2014) memiliki perbedaan relatif dalam tingkat perkembangan ekonomi antar daerah dan pemerataannya. Peningkatan taraf hidup setiap daerah, baik secara lokal maupun nasional, dalam upaya memperkuat daya saing suatu daerah (Bagianto et al., 2020).

Pengukuran daya saing wilayah yang ada saat ini masih lebih banyak menggunakan PDRB yang diformulasikan dengan komparasi sektor-sektor yang berkontribusi dalam pembentukan PDRB itu sendiri (Affandi, 2020). PDRB yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi regional di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin

provinsi-provinsi di Indonesia (Istiqamah, 2018). Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ukuran agregat, seperti daya saing, industrialisasi, keberlanjutan, dan 2 integrasi pasar, tidak dapat diukur oleh satu indikator saja. Sebaliknya, mereka harus diukur diberbagai sektor, termasuk PDRB, Rasio Gini, Kemiskinan, infrastruktur dan lingkungan (OECD, 2008).



Gambar 1. Skema Pengukuran Daya Saing Wilayah Berbasis Indeks Pembangunan Daerah

Penelitian ini mengukur daya saing wilayah menggunakan indeks pembangunan daerah. Pengukuran indeks pembangunan daerah melibatkan berbagai indikator yang lengkap, tidak hanya PDRB tapi juga Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, infrastruktur dan aspek lingkungan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Affandi, 2020), selain aspek ekonomi sosial dan infrastruktur, penelitian ini telah memasukkan aspek lingkungan di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya sekedar mengutamakan tujuan akhir pada output yang mengalami pertumbuhan atau peningkatan semata. Namun, lebih cenderung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur melalui penurunan angka pengangguran, disparitas atau kesenjangan, kemiskinan, pemerataan akses pendidikan, kesehatan serta perbaikan lingkungan (Safitri, 2021). Selain itu, pengukuran daya saing wilayah ini tidak menggunakan acuan wilayah yang berada di daerah tingkat I (DATI I), namun menggunakan teknik pembobotan dan perengkingan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan pengukuran daya saing wilayah melalui indeks pembangunan daerah dengan menggunakan alat analisis *Composite Performance Index (CPI)*. Dalam pengukuran ini akan menggunakan berbagai indikator yang lebih lengkap dari pengukuran-pengukuran sebelumnya dan menghasilkan suatu indeks yang dapat menggambarkan daya saing wilayah yang menjadi objek pengukuran.

Luwu Raya menjadi objek pengukuran dalam penelitian ini karena Luwu Raya terdiri dari 4 (empat) wilayah kesatuan yang saat ini sedang direncanakan untuk memisahkan diri dari provinsi Sulawesi Selatan dan

membentuk provinsi baru menjadi provinsi Luwu Raya. Meskipun berada dalam satu kesatuan wilayah namun disinyalir terjadi ketimpangan Pembangunan yang cukup besar antar daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan daerah, infrastruktur dan transformasi struktural yang terjadi pada wilayah-wilayah di Luwu Raya. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengukur dan membuktikan daya saing antar wilayah di Luwu Raya dengan pendekatan indeks Pembangunan daerah yang mengintegrasikan pengukuran indikator pembangunan daerah yang lebih komprehensif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Luwu Raya yang terdiri dari 4 (empat) wilayah yakni kota palopo, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu utara dan kabupaten Luwu Timur. Penentuan Lokasi penelitian ini didasarkan pada ada rencana pemerintah daerah untuk memisahkan diri dari provinsi asal yakni Sulawesi Selatan dan membentuk provinsi baru yakni provinsi Luwu Raya, sehingga peneliti merasa perlu mengkaji terkait daya saing antar wilayah tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan terkait rencana tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Lingkungan Hidup pada setiap kabupaten/kota yang berada di provinsi Luwu Raya tahun 2022 dan 2023. Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan studi Pustaka. Teknik analisis data menggunakan Composite Performance Indeks (CPI). Penelitian Anto Tri Susilo menunjukkan bahwa pendekatan CPI merupakan cara menghitung pengambilan keputusan berdasarkan indeks kinerja gabungan yang dapat digunakan untuk menghasilkan peringkat atau peringkat dari berbagai alternatif (i) berdasarkan sejumlah kriteria (j). Pendekatan CPI diterapkan pada evaluasi yang menggunakan kriteria tidak baku. Dalam teknik CPI, rumus berikut digunakan untuk menghitung penilaian atau pemeringkatan pilihan (i) yang berbeda berdasarkan sejumlah kriteria (j) dari berbagai alternative (i) (Susilo, 2017). Berdasarkan beberapa kriteria (j) pada metode CPI adalah sebagai berikut:

$$A_{i,j} = \frac{x_{i,j}}{\min(x_j)} \times 100 \dots \dots \dots (1)$$

$$A_{(i+1),j} = \frac{x_{(i+1),j}}{\min(x_j)} \times 100 \dots \dots \dots (2)$$

$$I_{i,j} = A_{i,j} \times P_j \dots \dots \dots (3)$$

$$I_i = \sum_{j=1}^m I_{i,j} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan:

- $A_{i,j}$ = Nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- $X_{(i,j)}$ = Nilai ke-I pada kriteria ke-j
- $\min(X_j)$ = Nilai minimum pada kriteria ke-j
- $A_{(i+1),j}$ = Nilai alternatif ke-i+1 pada kriteria ke-j
- $X_{(i+,j)}$ = Nilai kei+1 pada kriteria ke-j
- P_j = Bobot kepentingan kriteria ke-j
- $I_{i,j}$ = indeks alternatif ke-I pada kriteria ke-j

I_i = Indeks gabungan kriteria pada Alternatif ke- i

$I = 1, 2, 3, \dots, n$

$J = 1, 2, 3, \dots, m$

Menurut (Dahlan et al., 2022) Prosedur di CPI diuraikan sebagai berikut:

- a. Identifikasi kriteria tren positif (semakin tinggi nilainya semakin baik) dan tren negatif (semakin rendah nilainya semakin baik).
- b. Nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi menjadi 100 untuk kriteria tren positif, sedangkan nilai lainnya ditransformasikan secara proporsional lebih tinggi.
- c. Nilai minimum pada setiap kriteria tren negatif ditransformasi keseratus, sedangkan nilai lainnya ditransformasikan secara proporsional lebih rendah.
- d. Hasil perkalian nilai kriteria dengan bobot kriteria inilah yang menjadi perhitungan nilai alternatif.

Berikut langkah-langkah dalam menyusun indeks komposit yaitu sebagai berikut: 1) Kajian literasi indikator daya saing daerah; 2) Penentuan tren dan pembobotan; 3) Penentuan nilai minimum; 4) Analisis tren; 5) Indeks Alternatif; 6) *Composite performance index* (CPI); 7) Grafik *Composite Performance Index*; 8) Grafik radar distribusi pembangunan daerah

Teknik *Composite Performance Index* yang menggunakan perhitungan dari pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja digunakan untuk evaluasi dengan kriteria yang tidak konsisten. Indeks komposit dapat digunakan untuk memberi peringkat atau memutuskan diantara alternatif yang berbeda berdasarkan sejumlah faktor. Istilah berikut juga digunakan untuk menggambarkan proses dalam indeks kinerja gabungan. Gunakan tren positif (nilai lebih tinggi berarti lebih baik) dan kriteria deteksi tren negatif digunakan (nilai lebih rendah artinya semakin baik). Untuk kriteria trending positif, nilai minimal pada setiap kriteria dikonversi menjadisesatu persen/keseratus, sedangkan nilai lainnya dikonversi secara proporsional lebih tinggi. Untuk kriteria tren negatif, nilai minimum untuk setiap kriteria dikonversi satu persen/keseratus, dan nilai dikonversi lebih rendah. Perhitungan nilai alternatif/pengganti merupakan hasil perkalian antara nilaistandar dengan bobot standar. Perhitungan Bayes digunakan untuk memutuskan bagaimana mengukur alternative (Muryono et al., 2022).

Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini merujuk pada 4 (empat) aspek utama yaitu, ekonomi, sosial, infrastruktur dan lingkungan. Dimana pada masing-masing aspek memiliki turunan yang menjadi acuan dalam pengumpulan data, diantaranya : 1) Aspek ekonomi, yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi pendapatan perkapita, kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini; 2) Aspek sosial, yang meliputi kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan rasio gini; 3) Aspek infrastruktur, terdiri dari kondisi jalan mantap dan air bersih; 4)Aspek lingkungan, terdiri dari kualitas air dan kualitas udara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Indikator Pengukuran

Dalam pengukuran ini, digunakan 11 (sebelas) indikator yang diturunkan dari 4 (empat) aspek diantaranya aspek ekonomi, sosial, infrastruktur dan lingkungan. Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran dapat dilihat pada table 1 dibawah ini :

Tabel 1. Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya
Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Kab. Luwu Timur	Kab. Luwu Utara	Kota Palopo	Kab. Luwu
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,91	4,52	6,03	5,69
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,81	13,22	7,78	12,49
3	Rasio Gini	%	0,39	0,34	0,37	0,36
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,96	3,91	8,83	4,48
5	Pendapatan Perkapita	Rupiah	78581200	44326657	46518496	48239658
6	Umur Harapan Hidup	%	70,94	69,03	70,97	70,75
7	Rata-rata Lama Sekolah	%	8,92	7,87	11,09	8,48
8	Harapan Lama Sekolah	%	13	12,58	15,1	13,4
9	Kondisi Jalan Mantap	%	39,17	20,26	68,24	17,76
10	Penyaluran Air Bersih	Meter Kubik	3.428.173	2.693.739	7.742.291	2.630.912
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	79,71	76,74	78,38	76,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, (2023)

Dari sebelas indikator inilah diukur dengan metode *composite performance index*. Rata-rata data memiliki satuan persen (%) dan 1 data dengan satuan rupiah yakni pendapatan perkapita dan 1 data bersatuan kubikasi (meter kubik) yakni penyaluran air bersih. Namun hal ini tidak mempengaruhi hasil dari pengukuran ini karena penggunaan satuannya sama dan berlaku pada semua pengukuran. Data-data ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya badan pusat statistik, website pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup di masing-masing wilayah pengukuran.

Trend dan Pembobotan

Untuk menentukan bobot masing-masing indikator, studi pustaka digunakan dengan mengukur masing-masing indikator secara teori, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 2. Teori Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya
Tahun 2023

No.	Referensi	Teori
1	(BPS, 2010)	Bappenas pada tahun 2009 bekerjasama dengan BPS menyusun indeks pembangunan daerah dengan menggunakan dimensi Ekonomi, Sosial, Prasarana dan Pelayanan Publik, Kualitas Lingkungan Hidup, Teknologi, Komunikasi dan Informasi sebagai variabel pendukung daya saing daerah
2	(Sudiharta & Sutrisna, 2013)	Human capital, socio-institutional capital dan infrastruktur merupakan faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap daya saing daerah. Dalam studi ini, daya saing diproyeksikan dengan PDRB per kapita, produktivitas tenaga kerja dan tingkat kesempatan kerja
3	(Huda & Santoso, 2014)	Penelitian tentang daya saing daerah di Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa daerah perkotaan didominasi oleh sektor Produktivitas Sekunder, Produktivitas Tersier, Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, Infrastruktur dan Infrastruktur, serta sektor yang tidak berasal dari alam. Di wilayah Kabupaten, memiliki

		keunggulan di sektor Produktivitas Primer, dan sektor yang terkait dengan sumber daya alam.
4	(Furman, 2015)	Faktor-faktor pendukung daya saing adalah: infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan) dan lembaga politik (kualitas lembaga politik dan supremasi hukum), kebijakan moneter dan fiskal dan lingkungan ekonomi mikro. Selain itu, daya tarik investasi juga mempengaruhi daya saing suatu negara.
5	(Kementerian Dalam Negeri, 2016)	Indikator daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, sarana atau prasarana daerah, iklim investasi dan sumber daya manusia
6	(Rosinska-Bukowska, 2016)	Indikator daya saing daerah sebagaimana tercantum tercermin dalam kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut.

Sumber : Hasil-hasil penelitian terdahulu, buku dan jurnal, (2023)

Dari hasil pembobotan menggunakan metode perengkungan berdasarkan kajian literasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Tren dan Pembobotan Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2023

Indikator	Trend	Literatur					Total	Skor	Bobot	
		BPS	Sudiharta	Huda	Furman	KEMENDAGRI				Rosinska
P.E	Positif	1	1				1	3	7,50	0,08
T.K	Negatif	1	1				1	3	7,50	0,08
R.G	Negatif	1	1				1	3	7,50	0,08
TPT	Negatif		1	1	1	1	1	5	12,50	0,13
P.P	Positif	1	1	1			1	4	10,00	0,10
UHH	Positif		1	1		1		3	7,50	0,08
RLS	Positif	1	1	1	1	1		5	12,50	0,13
HLS	Positif		1	1	1	1		4	10,00	0,10
JLN MTP	Positif	1		1	1	1		4	10,00	0,10
AIR BER	Positif			1	1	1		3	7,50	0,08
IKLH	Positif	1		1	1			3	7,50	0,08
		Total						40	100	1,01

Sumber : Data diolah, (2023)

Dari hasil pembobotan tersebut, indikator pengangguran dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki bobot terbesar, yaitu 0,13. Disusul pendapatan perkapita, harapan lama sekolah dan kondisi jalan mantap sebesar 0,10 dan indikator lainnya berbobot 0,8. Hal ini menandakan bahwa skala indikator pembangunan yang perlu mendapat perhatian khusus tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, namun aspek sosial seperti pengangguran dan pendidikan juga perlu menjadi skala prioritas pembangunan di Luwu Raya.

Analisis Tren

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dari berbagai indikator, kemudian diolah berdasarkan nilai terkecil atau nilai minimum masing-masing data. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Determinasi Nilai Minimum Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah se-Luwu Raya Tahun 2023

Kab/Kota	P.E	T.K	R.G	TPT	P.P	UHH	RLS	HLS	JLN MNTAP	AIR BERSIH	IKLH
Luwu Timur	3,91	6,81	0,39	4,96	78581200	70,94	8,92	13	39,17	3.428.173	79,71
Luwu Utara	4,52	13,22	0,34	3,91	44326657	69,03	7,87	12,58	20,26	2.693.739	76,74
Kota Palopo	6,03	7,78	0,37	8,83	46518496	70,97	11,09	15,1	68,24	7.742.291	78,38
Luwu	5,69	12,49	0,36	4,48	48239658	70,75	8,48	13,4	17,76	2.630.912	76,57
Nilai Minimum	3,91	6,81	0,34	3,91	44326657	69,03	7,87	12,58	17,76	2630912	76,57

Sumber : Data diolah, (2023)

Kemudian dari data ini, data analisis tren ditentukan dengan menggunakan data yang telah ditentukan dan nilai minimum. Hasil analisis tren ini dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Analisis Trend Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2023

Kab/Kota	P.E	T.K	R.G	TPT	P.P	UHH	RLS	HLS	JLN MNTAP	AIR	IKLH	Total
Luwu Timur	100	100	87,18	78,83	177,28	102,77	113,34	103,34	220,55	130,30	104,10	1317,69
Luwu Utara	115,60	51,51	100	100	100	100	100	100	114,08	102,39	100,22	1083,80
Kota Palopo	154,22	87,53	91,89	44,28	104,94	102,81	140,91	120,03	384,23	294,28	102,36	1627,51
Luwu	145,52	54,52	94,44	87,28	108,83	102,49	107,75	106,52	100	100	100	1107,36
Total	515,35	293,57	373,52	310,39	491,05	408,07	462,01	429,89	818,86	626,97	406,69	
Rata-rata	128,84	73,39	93,38	77,60	122,76	102,02	115,50	107,47	204,72	156,74	101,67	
Bobot	0,08	0,08	0,08	0,13	0,10	0,08	0,13	0,10	0,10	0,08	0,08	1,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, (2023)

Dari hasil analisis tren di atas, ditentukan indeks alternatif data. Indeks alternatif dapat dilihat pada tabel 6. Di bawah ini :

Tabel 6. Indeks Alternatif Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2023

Indikator Daya Saing	Luwu Timur	Luwu Utara	Kota Palopo	Luwu	Total	Rata-Rata
Pertumbuhan Ekonomi	7,5	8,67	11,57	10,91	38,6509	9,66
Tingkat Kemiskinan	7,5	3,86	6,56	4,09	22,0176	5,50
Rasio Gini	6,54	7,5	6,89	7,08333	28,0137	7,00
T. Pengangguran Terbuka	9,85	12,5	5,54	10,91	38,7985	9,70
Pendapatan Perkapita	17,73	10	10,49	10,88	49,105	12,28
Umur Harapan Hidup	7,71	7,5	7,71	7,69	30,6052	7,65
Rata-rata Lama Sekolah	14,17	12,5	17,61	17,61	61,8964	15,47
Harapan Lama Sekolah	10,33	10	12,00	12,00	44,3402	11,09
Kondisi Jalan Mantap	22,06	11,41	38,42	10,65	82,5381	20,63
Penyaluran Air Bersih	9,77	7,68	22,07	10	49,523	12,38
I. Kualitas Lingkungan H.	8,33	8,02	8,19	7,5	32,0349	8,01
Total	121,49	99,64	147,06	8		119,38
Rata-rata						10,85

Sumber : Data diolah, (2023)

Hasil standardisasi data diperoleh skor yang sama pada rentang 0-100. Secara rata-rata, skor semua indikator adalah 10,85, dengan skor rata-rata tertinggi adalah indikator jalan mantap atau infrastruktur sebesar 20,63. skor rata-rata terendah sebesar 5,50 yakni indikator kemiskinan. Data menunjukkan bahwa masalah jalan mantap atau infrastruktur tidak begitu signifikan di Luwu Raya, tetapi pembangunan perlu difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang disinkronkan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Luwu Raya.

Composite Performance Index

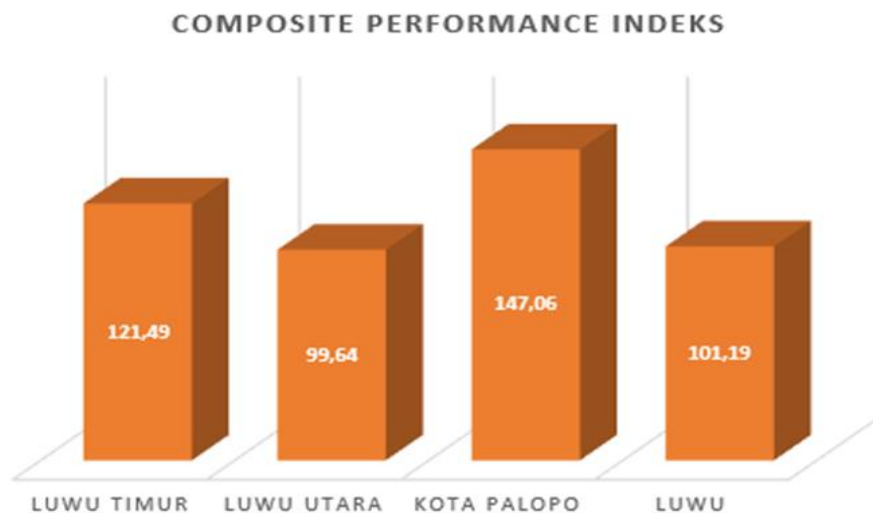
Selanjutnya dari indeks alternatif ini dapat ditentukan composite performance index (CPI) yang menggambarkan daya saing masing-masing Kabupaten Kota di Luwu Raya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7. Bawah:

Tabel 7. Composite Performance Index Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2023

Kab/Kota	Indikator Daya Saing Wilayah											CPI
	P.E	T.K	R.G	TPT	P.P	UHH	RLS	HLS	K.JLN MANTAP	AIR BERSIH	IKLH	
Luwu Timur	7,50	7,50	6,54	9,85	17,73	7,71	14,17	10,33	22,06	9,77	8,33	121,49
Luwu Utara	8,67	3,86	7,50	12,50	10,00	7,50	12,50	10,00	11,41	7,68	8,02	99,64
Kota Palopo	11,57	6,56	6,89	5,54	10,49	7,71	17,61	12,00	38,42	22,07	8,19	147,06
Luwu	10,91	4,09	7,08	10,91	10,88	7,69	13,47	10,65	10,00	7,50	8,00	101,19
Total	38,65	22,02	28,01	38,80	49,10	30,61	57,75	42,99	81,89	47,02	32,53	
Rata-rata	9,66	5,50	7,00	9,70	12,28	7,65	14,44	10,75	20,47	11,76	8,13	

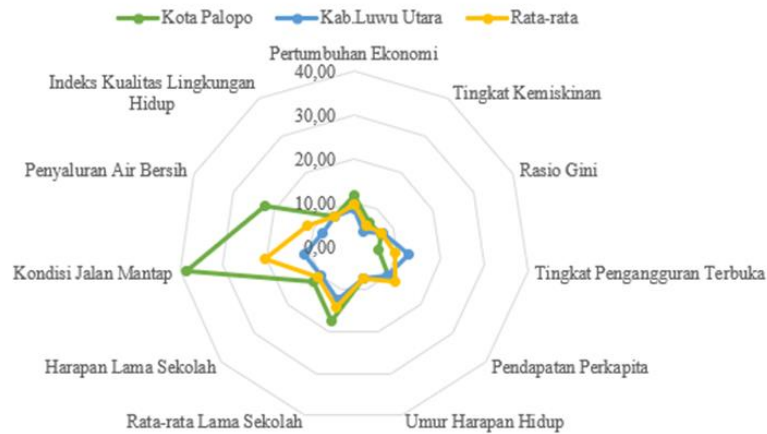
Sumber : Data diolah, (2023)

Pengolahan data dalam penentuan composite performance index menemukan bahwa Kota Palopo memiliki indeks komposit yang paling besar yakni 147,06% sedangkan daerah yang memiliki CPI terkecil adalah Kabupaten Luwu Utara, yaitu 99,64%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan hasil CPI antar Kabupaten Kota dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 1. Diagram Composite Performance Indeks (CPI)

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan yang cukup besar antara Kota Palopo dengan daerah lainnya. Ketimpangan indeks berada pada kisaran 48% (147,06% - 99,64%) dan tergolong ketimpangan yang cukup besar. Pada skala pengukuran ketimpangan pendapatan, jika indeks ketimpangan pendapatan lebih besar dari 30% maka diklasifikasikan sebagai ketimpangan sedang atau menengah dan jika lebih besar dari 50% maka diklasifikasikan sebagai ketimpangan besar. Hanya 2% selisih ketimpangan yang dapat dikategorikan sebagai ketimpangan besar. Ketimpangan ini dapat dilihat pada grafik radar di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Radar Wilayah dengan CPI terbesar dan terkecil serta rata-rata

Ketimpangan wilayah yang terjadi antara daerah dengan daya saing tertinggi, yaitu Kota Palopo dengan daerah berdaya saing terendah yaitu Kabupaten Luwu Utara tergambar pada grafik radar di atas dengan perbandingan rata-rata yang diantara keduanya.

3.2. Pembahasan

Indeks Pembangunan Daerah Luwu Raya

Dari hasil analisis indeks gabungan, indeks pembangunan daerah Kabupaten/Kota di Luwu Raya tergolong kurang merata. Hal ini dapat dilihat dari selisih akumulasi indeks gabungan dari indeks alternatif dengan CPI tertinggi dan terendah dengan selisih 48%. Sementara selisih CPI antara wilayah dengan CPI tertinggi yakni di Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur sebagai wilayah dengan CPI tertinggi kedua setelah Kota Palopo yakni sebesar 26%. Selisih inipun cukup jauh, meninjau selisih antara CPI wilayah Luwu Utara sebagai wilayah dengan CPI paling rendah dan Kabupaten Luwu hanya sebesar 2%.

Dari selisih CPI tersebut menggambarkan jurang ketimpangan Pembangunan wilayah di Luwu Raya sekaligus menunjukkan wilayah mana yang paling berdaya saing diantara wilayah-wilayah yang ada di Luwu Raya. Sementara indeks alternatif dapat menunjukkan indikator apa yang paling berperan dalam pembentukan daya saing di wilayah-wilayah tersebut.

Daya Saing Wilayah

Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur menjadi wilayah dengan CPI tertinggi kedua setelah Kota Palopo. Walaupun lokasinya lebih jauh dari Kota Palopo dibandingkan dengan dua Kabupaten lainnya namun Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi wilayah yang sangat mendukung daya saing wilayah nya yakni potensi sektor pertambangan. Aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat dalam Upaya Pembangunan yang berdaya saing di Kabupaten Luwu Timur adalah aspek sosial pemerataan pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini. Berdasarkan hasil olah data yang diuraikan pada indeks alternatif, rasio gini menjadi indikator yang paling lemah yakni hanya sebesar 6,54%.

Sementara infrastruktur yang diukur dengan data kondisi jalan mantap menjadi indikator yang paling menguatkan daya saing wilayah tersebut yakni sebesar 22,06%. Lalu disusul oleh indikator pendapatan perkapita yakni sebesar 17,73%.

Banyaknya Perusahaan tambang yang beroperasi di Luwu Timur mendukung perbaikan infrastruktur yakni jalan mantap melalui dana CSR dan sekaligus menjadi kebutuhan operasional Perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Sementara, tingginya pendapatan perkapita yang terjadi bersamaan dengan tingginya rasio gini di Kabupaten Luwu Timur menandakan bahwa pendapatan tinggi didominasi oleh golongan minoritas dan tidak terdistribusi secara merata. Hal ini sejalan dengan penelitian (Zaini et al., n.d.) yang menyatakan bahwa kontribusi subsector batubara (pertambangan) dalam perekonomian berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi kontribusi subsector batubara (pertambangan) dalam perekonomian, semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian (Loayza Jamele Rigolini et al., 2016) Di Peru yang menyatakan bahwa pertambangan memperburuk distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan sektor pertambangan memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan penguasaan teknologi, karena tidak semua orang dapat menggunakan alat berat dan teknologi pertambangan lainnya terutama warga atau tenaga kerja lokal yang minim Pendidikan dan keterampilan.

Oleh karena itu, pemerataan atau ketimpangan menjadi sebab masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dapat menjadi dasar bahwa Upaya Pembangunan di Kabupaten Luwu Timur seharusnya dipusatkan pada program-program pemerataan pendapatan melalui program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sebaiknya penggunaan tenaga kerja lokal dapat menjadi alternatif solusi namun hal ini perlu juga didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang menunjang.

Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara menjadi wilayah yang paling lemah dari aspek daya saing wilayah di Luwu Raya. Dengan nilai CPI yang hanya sebesar 99,06% dan merupakan wilayah dengan nilai CPI terendah diantara wilayah lainnya di Luwu Raya. Dibandingkan dengan wilayah pemekarannya yakni Kabupaten Luwu Timur, selisih nilai CPI antara keduanya cukup jauh yakni sekitar 22%. Padahal Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Aspek yang paling berperan dalam rendahnya daya saing Kabupaten Luwu Utara yakni aspek sosial yang diukur dengan tingkat kemiskinan yakni hanya sebesar 3,86% yang disusul oleh rasio gini dan umur harapan hidup sebesar 7,5%. Rendahnya nilai CPI di Kabupaten Luwu Utara didominasi oleh sektor-sektor sosial ekonomi seperti tingkat kemiskinan, pendapatan perkapita, umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan kondisi jalan mantap yang masing-masing memiliki indeks alternatif paling rendah jika dibandingkan dengan aspek yang sama di wilayah Luwu Raya lainnya.

Lemahnya aspek infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara menyebabkan lemahnya berbagai aspek lainnya seperti Pendidikan dan Kesehatan yang berimbas pada tingkat kemiskinan dan masalah sosial ekonomi lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Faradis, 2020) yang menerangkan bahwa Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengusung prinsip *pro-poor, pro growth, dan pro-job*

Kota Palopo

Kota Palopo menjadi wilayah yang paling berdaya saing di Luwu Raya dengan nilai CPI sebesar 147,06% dan menjadi wilayah dengan CPI tertinggi di Luwu Raya. Dari data indeks alternatif menunjukkan bahwa infrastruktur menjadi komponen yang paling menunjang daya saing di Kota Palopo. Pembangunan yang berfokus pada infrastruktur ini mendukung peningkatan aspek Pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang menunjang juga dapat berdampak positif pada kegiatan investasi, memperkuat produktifitas dan efisiensi bisnis, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menstabilkan angka kemiskinan di Kota Palopo. Hal ini sejalan dengan penelitian (Andy et al., 2019) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa dari aspek sosial ekonomi, Kota Palopo masih terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi didominasi oleh golongan minoritas dan tidak merata penyebarannya. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dan termasuk wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Luwu Raya. Dari data indeks alternatif, nilai TPT Kota Palopo hanya 5,54% sementara yang tertinggi yakni di Kabupaten Luwu dengan nilai indeks alternatif sebesar 10,91%. Sehingga pemerintah Kota Palopo perlu memfokuskan Pembangunannya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Kota Palopo dan mempersempit jurang ketimpangan pendapatan di Masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Retno et al., n.d.) yang menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa semua orang akan menjamin bahwa semua orang akan memperoleh manfaat yang sama. Dewi Purwanti & Rahmawati, 2021) juga menerangkan dalam penelitiannya bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif,

Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu berada pada peringkat ke 3 dari 4 daerah di Luwu Raya dengan CPI terendah setelah Kabupaten Luwu Utara. Nilai CPI di Kabupaten Luwu Utara sebesar 101,09% dan hanya selisih 2% dari Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu merupakan wilayah tertua di Luwu Raya. Tapi tingkat daya saing wilayahnya sangat rendah. Terutama pada aspek infrakstruktur yang menjadi nilai indeks alternatif paling rendah dari aspek kondisi jalan mantap di Luwu Raya. Disusul oleh tingkat kemiskinan yang hanya bernilai 4,09% paling rendah setelah tingkat kemiskina di Luwu Utara dari hasil pengukuran indeks alternatif.

Hal yang menjadi perhatian dari hasil pengukuran ini adalah tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu disertai dengan rendahnya jurang kesenjangan pendapatan di wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Luwu tersebar secara cukup merata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Dinda Syahrir, 2020) yang menegaskan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara.

Namun berbeda dengan hasil penelitian (Handoyo Mulyo et al., 2015). Kesenjangan (inequality) merupakan isu lain yang sering dikaitkan dengan kemiskinan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan analisis pengukuran indeks pembangunan daerah di Luwu Raya, yang menjadi temuan bahwa tingkat daya saing wilayah-wilayah di Luwu Raya masih terdistribusi kurang merata. Dari hasil pengukuran Composite Performance Indeks, Kota Palopo menjadi wilayah dengan tingkat daya saing paling tinggi, sementara Kabupaten Luwu Utara menjadi wilayah dengan tingkat daya saing paling rendah dan hanya selisih tipis dengan Kabupaten Luwu. Adapun yang menjadi aspek paling berpengaruh terhadap daya saing dari wilayah-wilayah tersebut adalah aspek infrastruktur yang diukur dengan data kondisi jalan mantap dan penyaluran air bersih. Aspek infrastruktur menjadi indikator yang menjadi pioner dan dapat memberikan dampak positif maupun negative terhadap Pembangunan di Luwu Raya. Berdasarkan hal ini pun yang dapat direkomendasikan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan :1) Pemerintah di Luwu Raya untuk memperhatikan pembangunan dan daya saing di wilayah yang berfokus pada infrastruktur, terutama infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Sosial; 2) Pemerintah di Luwu Raya untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan melalui penguatan daya beli Masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang dapat diwujudkan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif di Luwu Raya; 3) Penyedia data dan informasi regional maupun nasional (Badan Pusat Statistik) untuk menyajikan data dan informasi terkait indeks Pembangunan daerah yang terukur secara komprehensif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPS. (2010). *Indeks Pembangunan Regional*.

Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. 2016(1038), 1–19.

OECD. (2008). *OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics*. www.oecd.org/publishing

Artikel Jurnal

Affandi, K. A. (2020). Upaya Mengukur Daya Saing Wilayah melalui Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 295. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.741>

Andy, H., Panjaitan, M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara*. 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.2944/jekp.8.1.43-61>

Bagianto, A., Wandy, & Zulkarnaen. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mea*, VOL4 NO 1(1), 316–332. www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/263

- Dahlan, B. Bin, Betrisandi, B., & Diange, M. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Beasiswa Prestasi Miskin Dengan Metode Composite Performance Index (CPI). *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.32672/jnkti.v5i1.3849>
- Dewi Purwanti, S., & Rahmawati, F. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia*. 4(1).
- Dinda Syahrir, Y. G. (2020). 59-Article Text-195-1-10-20201223. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34–43.
- Faradis, R. (2020). Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 33–55. <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.03>
- Handoyo Mulyo, J., Natalia Seleky, R., Sosial Ekonomi Pertanian, J., Pertanian, F., & Gadjah Mada, U. (2015). *Poverty and Income Inequality Among Households in Bojonegoro Regency* (Vol. 26, Issue 2). www.bps.go.id
- Huda, M., & Santoso, E. B. (2014). Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), 81–86.
- Huggins, R., Izushi, H., Prokop, D., & Thompson, P. (2014). Regional competitiveness, economic growth and stages. *Zb. Rad. Ekon. Fak. Rij.*, 32, 255–283.
- Loayza Jamele Rigolini, N., Loayza Jamele Rigolini World Bank World Bank, N., Wada, T., Pablo Uribe, J., Wong, P., Meza-Cuadra, C., & Franco, J. (2016). *The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru* *The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru* *.
- Retno, W., Pusat, H. B., Kabupaten, S., Provinsi, K., & Tengah, J. (n.d.). *ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH*. 3, 106–116.
- Rosińska-Bukowska, M. (2016). Systemic Competitiveness-New Challenges for Enterprises in the 21 St Century. *Central European Review of Economics & Finance*, 12(2), 5–19.
- Safitri, M. I. D. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Sudiharta, P. S. P., & Sutrisna, K. (2013). Pengaruh Pdrb Per Kapita, Pendidikan, Dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali kesejahteraan masyarakat . ke. *E-Jurnal Ep Unud*, 3(10), 431–439.

Susilo, A. A. T. (2017). Penerapan Metode CPI Pada Pemilihan Hotel Dikota Lubuklinggau. *Resti*, 1(1), 19–25.

Zaini, A., Kekayaan, P., Alam, S., Terhadap, B., Pendapatan, K., Provinsi, D., & Timur, K. (n.d.). *THE EFFECT OF COAL ABUNDANCE ON INCOME INEQUALITY IN EAST KALIMANTAN PROVINCE*.

Prosiding Seminar/Konferensi

Furman, J. (2015). The Determinants of Regional Competitiveness. *Academy of Management Proceedings*, 2015(1), 13549. <https://doi.org/10.5465/ambpp.2015.13549symposium>